

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN CAMAT ILE BURA TAHUN 2020



KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BURA
LEWOTOBI

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat Ile Bura Tahun 2020, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bupati merupakan salah satu kewajiban pemerintah kecamatan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Penyampaian LKPJ kepada Pemerintah secara substansial merupakan sebuah *progress report* yang menggambarkan kinerja pemerintah kecamatan secara utuh, selama satu tahun anggaran. LKPJ ini juga menggambarkan akuntabilitas capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian gambaran kinerja di dalam LKPJ ini merupakan implementasi dari penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Sejalan dengan itu, LKPJ secara substantif merupakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang dicapai selama satu tahun anggaran dengan berbagai keberhasilan dan tentunya masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi dan ditingkatkan pada tahun mendatang. Atas segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada Tahun 2020, akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintah kecamatan di tahun mendatang. Segala saran, kritikan yang bersifat koreksi konstruktif sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Ile Bura di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Lewotobi, Februari 2021.

CAMAT ILE BURA,

YAKOBUS ARA KIAN, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19690214 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Hukum.....	2
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
1.3. Data Umum Wilayah.....	3
1. Data Geografis Wilayah.....	3
2. Jumlah Penduduk.....	4
3. Pertumbuhan Penduduk.....	5
4. Jumlah PNS.....	5
5. Realisasi Pendapatan.....	7
6. Realisasi Belanja.....	7
7. Realisasi Pembiayaan.....	12
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	13
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	13
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	13
BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAH.....	16
4.1. Forum Koordinasi.....	16
4.2. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2021.....	16
4.3. Fasilitasi Dokumen Pendapatan dan Belanja Desa TA.2020.....	17
4.4. Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Keuangan Desa TA.2020.....	18
4.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran.....	18
4.6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	19
BAB V PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari surat Bupati Flores Timur nomor: Pem.Um.130/01/OTDA/2021 tanggal 7 Januari 2020 tentang Permintaan Data LKPJ dan LPPD Tahun 2020, maka Camat wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kecamatan sebagai konsekuensi kewenangan yang diberikan dalam kerangka pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah di wilayah. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelimpahan tugas dimaksud dan juga sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan bupati kepada gubernur dan nantinya akan diukur sejauh mana kinerja pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 1 tahun berjalan.

1.1. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ile Bura tentunya tidak terlepas dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Adonara

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah **Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.**

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan :

1. **Flores Timur Sejahtera** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. **Desa Membangun Kota Menata** adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. **Selamatkan Orang Muda Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. **Selamatkan Infrastruktur Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. **Selamatkan Tanaman Rakyat** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
4. **Selamatkan Laut Flores Timur** dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. **Reformasi Birokrasi** dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governanance dan Clean Government

1.3. Data Umum Wilayah

1. Data Geografis Wilayah

Kecamatan Ile Bura merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk pada tahun 2007, dengan topografi bergunung dan berbukit dengan kemiringan yang lebih dominan < 500 m DPL, dengan musim hujan \pm 3 bulan dan musim kemarau 9 bulan membawa kendala tersendiri. Selain itu, seiring dengan perubahan iklim global, pergantian musim menjadi tidak menentu dan anomali cuaca yang sulit diprediksi, membawa implikasi tersendiri terhadap berbagai kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ile Bura ini.

Luas wilayah Kecamatan Ile Bura adalah : 48,53 Km² dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

U t a r a	: Kecamatan Titehena – Kabupaten Flores Timur
S e l a t a n	: Selat Lewotobi
T i m u r	: Kecamatan Titehena – Kabupaten Flores Timur
B a r a t	: Kecamatan Wulanggitang- Kabupaten Flores Timur

Luas wilayah per desa dan tinggi rata-rata dari permukaan laut seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel				
Luas Wilayah Per Desa dan Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut				
No.	Nama Desa	Luas Desa (Km ²)	Tinggi Rata-rata DPL (m)	Persentasi Terhadap Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Nobo	2.75	100	5.67
2.	Nurabelen	8.45	100	17.41
3.	Riang Rita	3.85	100	7.93
4.	Lewotobi	9.15	100	18.85
5.	Lewoawang	10.25	100	21.12
6.	Riangbaring	8.26	300	17.02
7.	Dulipali	5.82	1200	11.99
Jumlah		48.53		100.00

Sumber : Profil Kecamatan Ile Bura dalam Angka

2. Jumlah Penduduk

Sebaran penduduk Kecamatan Ile Bura sampai 31 Desember 2020, tercatat mencapai 7.614 jiwa, dengan rincian sebagai berikut : Laki-laki sebanyak 3.825 jiwa atau 50,23% dan Perempuan sebanyak 3.789 jiwa atau 49,77%. Sedangkan desa dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Desa Nobo sebanyak 1.629 jiwa atau 21,39%, disusul Desa Lewotobi sebanyak 1.552 jiwa atau 20,38% dan Desa Lewoawang sebanyak 1.313 jiwa atau 17,24%. Sedangkan sebaran penduduk terendah adalah Desa Dulipali sebanyak 759 jiwa atau 9,96%, disusul Desa Riangrita sebanyak 697 jiwa atau 9,15%

Tabel					
Jumlah Penduduk Kecamatan Ile Bura per Desa Tahun 2020					
No.	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1.	Nobo	366	831	798	1,629
2.	Nurabelen	196	421	387	808
3.	Riang Rita	157	351	346	697
4.	Lewotobi	384	781	771	1,552
5.	Lewoawang	316	648	665	1,313
6.	Riangbaring	197	437	419	856
7.	Dulipali	174	356	403	759
Jumlah		1,790	3,825	3,789	7,614

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2020

3. Pertumbuhan Penduduk

Dalam demografi dan ekologi, Nilai Pertumbuhan Penduduk (NPP) adalah nilai kecil di mana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode. Nilai Pertumbuhan Penduduk didapat dari Populasi Akhir Periode dikurangi Populasi Awal Periode dibagi Populasi Awal Periode.

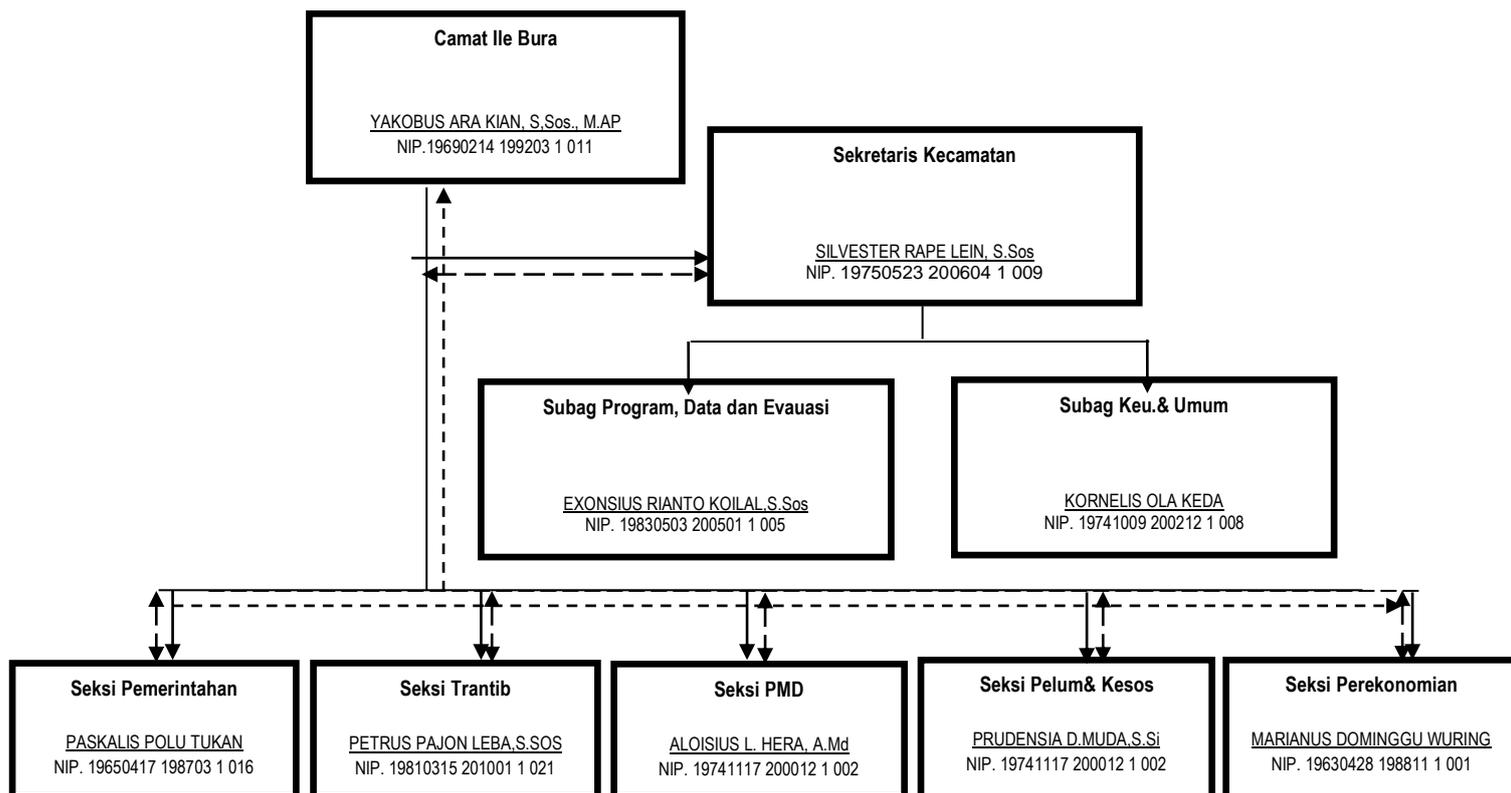
Berdasarkan hasil rekapitulasi penduduk Kecamatan Ile Bura tahun 2020, Nilai Pertumbuhan dan Rasio Penduduk di Kecamatan Ile Bura dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel				
Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Ile Bura Tahun 2020				
No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Nilai Pertumbuhan Penduduk
		Awal tahun	Akhir tahun	
1	2	3	4	5
1.	Nobo	1.588	1.614	0,02
2.	Nurabelen	711	744	0,05
3.	Riang Rita	729	734	0,01
4.	Lewotobi	1.349	1.376	0,02
5.	Lewoawang	1.213	1.247	0,03
6.	Riangbaring	862	864	0,00
7.	Dulipali	730	736	0,01
Jumlah		7.182	7.315	0,13

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2020

4. Jumlah PNS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016. Tata kelola pemerintahan Kecamatan Ile Bura dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu seorang Sekretaris, 5 orang Kepala Seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 5 staf pelaksana. Di samping itu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Ile Bura dibantu oleh 5 orang tenaga kontrak. Adapun Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Bura sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Sumber Daya Aparatur dalam Jabatan Struktural SKPD Kecamatan Ile Bura dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel
Jumlah PNS Kantor Camat Ile Bura berdasarkan Jabatan Tahun 2020

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	5 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			9 orang

Sumber :Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2020.

Tabel
Keadaan PNS Menurut Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
2.	Pembina	IV/a	-
3.	Penata Tingkat I	III/d	4 orang
4.	Penata	III/c	2 orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1 orang
6.	Penata Muda	III/a	2 orang

7.	Pengatur Tingkat I	II/d	-
8.	Pengatur	II/c	4 orang
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
10.	Pengatur Muda	II/a	-
11.	Juru Tingkat I	I/d	-
12.	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
13.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			14 Orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2020.

Tabel
Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	4 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	1 orang
4.	Diploma I/Diploma II	0 orang
5.	SLTA	8 orang
6.	SLTP	0 orang
7.	SD	0 orang
JUMLAH		14 Orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2020.

Tabel
Keadaan PNS Menurut Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	0 orang
2.	PIM III / SPAMA	1 orang
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	2 orang
JUMLAH		3 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2020.

Keadaan Tenaga Honorer Kecamatan Tahun 2020 berjumlah : 5 (*Lima*) orang.

5. Realisasi Pendapatan

NIHIL

6. Realisasi Belanja

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

<i>Target</i>	:	Rp 720.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 720.000				
<i>Prosentase</i>	:	100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya meterai.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya urusan administrasi surat menyurat, optimalisasi koordinasi vertikal demi sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan.				

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

<i>Target</i>	:	Rp 10.800.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 10.800.000				
<i>Prosentase</i>	:	100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya pulsa, air bersih dan listrik/penerangan.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya koordinasi pemerintahan, terpenuhinya kebutuhan akan air bersih dan penerangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.

<i>Target</i>	:	Rp 1.000.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 1.000.000				
<i>Prosentase</i>	:	100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dokumen perizinan untuk kendaraan dinas roda 2				
<i>Outcome</i>	:	Kenyamanan pelayanan bagi masyarakat dan kebutuhan koordinasi				

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

<i>Target</i>	:	Rp 26.400.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 26.400.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya honorarium bagi Satuan Perangkat Pemegang Kas				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya pengelolaan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan.				

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

<i>Target</i>	:	Rp 2.000.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 2.000.000				
<i>Prosentase</i>	:	100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor.				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif .				

6. Penyediaan alat tulis kantor.

<i>Target</i>	:	Rp 21.000.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 21.000.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai.				
<i>Outcome</i>	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang optimal.				

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

<i>Target</i>	:	Rp 5.600.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 5.600.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana untuk penggandaan dan penjilidan.				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya dokumen administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.				

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan.

<i>Target</i>	:	Rp 1.475.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 1.475.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya instalasi listrik gedung kantor yang baik.				
<i>Outcome</i>	:	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

<i>Target</i>	:	Rp 15.500.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 15.500.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya anggaran makanan dan minuman rapat dan tamu dinas.				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya sinergisitas sistem koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.				

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

<i>Target</i>	:	Rp 93.385.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 93.375.500				
<i>Prosentase</i>	:	99,99%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana operasional pendukung.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi vertikal dan horisontal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

11. Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran

<i>Target</i>	:	Rp 69.000.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 69.000.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana untuk membiayai tenaga pendukung dan teknis perkantoran.				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.				

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

<i>Target</i>	:	Rp 44,049,000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 44,049,000				
<i>Prosentase</i>	:	100.00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya kendaraan operasional di kecamatan				
<i>Outcome</i>	:	Terbantunya proses koordinasi pelayanan pemerintahan di kecamatan				

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

<i>Target</i>	:	Rp 20,208,650				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 20,208,650				
<i>Prosentase</i>	:	100.00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya sound system dan personal komputer serta printer kantor				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

<i>Target</i>	:	Rp 10.000.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 10.000.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Terpeliharanya bangunan gedung kantor.				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya situasi kerja yang kondusif bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.				

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

<i>Target</i>	:	Rp 6.525.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 6.525.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya biaya servis kendaraan dan BBM				
<i>Outcome</i>	:	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas kantor dan operasional perkantoran.				

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

<i>Target</i>	:	Rp 13.371.500				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 13.371.500				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana untuk penyusunan dokumen kinerja				
<i>Outcome</i>	:	Tercapainya penyusunan laporan dokumen Kinerja Kecamatan				

d. Program koordinasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

<i>Target</i>	: Rp 17.710.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 17.710.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG RKPD Kab. di Kec.				
<i>Outcome</i>	: Tersedianya dokumen usulan perencanaan pembangunan				
	Tingkat Kecamatan.				

2. Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan kemasyarakatan

<i>Target</i>	: Rp 56.400.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 56.400.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya honorarium bagi FORKOPINCAM.				
<i>Outcome</i>	: Terlaksananya koordinasi untuk menjamin kamtibmas				
	Tingkat Kecamatan.				

3. Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

<i>Target</i>	: Rp 10.500.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 10.500.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya dana monitoring Pengelolaan Keuangan desa				
<i>Outcome</i>	: Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan oleh desa				

7. Realisasi Pembiayaan

NIHIL

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

(Diisi oleh Tim Penyusun/BKAD)

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kantor Camat Ile Bura	Fungsi Penunjang Prioritas		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
				Penyediaan jasa surat menyurat.	120 lembar	720.000	120 lembar	720.000	-	-	-
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	10.800.000	12 bulan	10.800.000	-	-	-
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	5 unit	1.000.000	5 unit	1.000.000	-	-	-
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	4 orang	26.400.000	4 orang	26.400.000	-	-	-
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	25 jenis/tahun	2.000.000	25 jenis/tahun	2.000.000	-	-	-
				Penyediaan alat tulis kantor	39 jenis/tahun	21.000.000	39 jenis/tahun	21.000.000	-	-	-
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	11.200 lembar/tahun	5.600.000	11.200 lembar/tahun	5.600.000	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	1 paket/tahun	1.475.000	1 paket/tahun	1.475.000	-	-	-
				Penyediaan Makanan dan Minuman	620 porsi/tahun	15.500.000	620 porsi/tahun	15.000.000	-	-	-
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	200 OH/tahun	93.385.000	200 OH/tahun	93.375.000	-	-	-
				Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	5 orang	69.000.000	5 orang	69.000.000	-	-	-

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tinjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kantor Camat Ile Bura	Fungsi Penunjang Prioritas		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit	44.049.000	2 unit	44.049.000	-	-	-
				Pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket/tahun	20.208.650	1 paket/tahun	20.208.650	-	-	-
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket/tahun	10.000.000	1 paket/tahun	10.000.000	-	-	-
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 paket/tahun	6.525.000	1 paket/tahun	6.525.000	-	-	-
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1 paket/tahun	13.371.500	1 paket/tahun	13.371.500	-	-	-
				Program koordinasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat							
				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 paket	17.710.000	1 paket	17.710.000	-	-	-
				Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan kemasyarakatan	1 paket	56.400.000	1 paket	56.400.000	-	-	-
				Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 paket	10.500.000	1 paket	10.500.000	-	-	-

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAH

4.1. Forum Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan bersifat langsung dan terarah kepada Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam kaitan dengan penyebaran program/kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Ile Bura. Di Kecamatan di kenal dengan Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM), yang mana secara teknis dilakukan oleh Camat, Kapospol dan Babinsa Ile Bura serta dibantu oleh Sekretariat FORKOPIMCAM yang anggotanya terdiri dari para Kepala-kepala Seksi dan Kepala UPTD se Kecamatan Ile Bura.

Materi Koordinasi berupa :

- Penyelesaian Konflik wilayah perbatasan antar desa dalam wilayah kecamatan maupun antar kecamatan.
- Penebangan/pengrusakan hutan
- Bencana kebakaran hutan
- pemboman liar di wilayah perairan sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Ile Bura
- Penertiban SITU-SIUP
- Penyelenggaraan pemerintahan desa
- Pelaksanaan Posyandu
- Masalah kesehatan masyarakat
- Peredaran/penjualan obat dan makanan
- Keuangan dan perpajakan

4.2. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

Untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang benar-benar optimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, maka pendampingan pra pelaksanaan MUSRENBANGDES dilakukan sebanyak 3 (*tiga*) kali, selama Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober 2020. Dalam kaitan pendampingan Pelaksanaan MUSRENBANGDES penyusunan RKPDesa Tahun 2021 mulai dilakukan oleh Tim Kecamatan pada Minggu ke-III Bulan Juli 2020 s/d Minggu ke-IV Bulan Oktober 2020.

Adapun hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan (*Tim Kecamatan*) :

- ☞ Keterlibatan masyarakat melalui kelembagaan yang ada sangat antusias dan terimplementasi dalam perencanaan yang diusulkan melalui kegiatan-kegiatan pada masing-masing komponen/kelembagaan yang ada di desa.
- ☞ Masyarakat sudah memahami alur perencanaan; berdasarkan hasil kajian masalah-tindakan masalah-dan rumusan kegiatan melalui program/bidang kegiatan yang ada di desa.
- ☞ Adanya titik simpul antara perencanaan masing-masing komponen yang bermuara pada satu usulan kegiatan yang saling berkaitan (*lintas bidang*)
- ☞ Masyarakat sebagai pengawas pembangunan sudah semakin kritis dalam mengevaluasi kegiatan pembangunan di desa dan evaluasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang termuat dalam APBDesa .

Dari 7 desa se-Kecamatan Ile Bura 4 (empat) desa sudah menetapkan RKPDesa Tahun 2020 dan diundangkan melauai Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2020.

4.3. Fasilitasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

- ☞ Untuk kegiatan Fasilitasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sudah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- ☞ Evaluasi APBDes untuk desa-desa se Kecamatan Ile Bura dilakukan sesuai jadwal dan tahapannya.
- ☞ Kondisi Pandemi Covid-19 sangat berakibat buruk terhadap pengelolaan APBDes di desa, yang mengakibatkan sebagian anggaran dana desa diprioritaskan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai selama 12 bulan bagi Keluarga Penerima Manfaat sesuai kesepakatan dalam Musyawarah Penetapan Penerima BLT-Dana Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Tentang Penerima BLT-dana Desa Tahun 2020.
- ☞ Kondisi ini mengakibatkan sejumlah kegiatan APBDes dialihkan utmuk kegiatan BLT-Dana Desa (*Refocusing*) dan tentu saja pengelolaan keuangan desa mengalami perubahan pada Bulan Oktober 2020.

- ☞ Pandemi Covid-2019 mengakibatkan juga penurunan pagu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar RP. 10.807.000,- bagi semua desa di Kabupaten Flores Timur.

4.4. Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020

- ☞ Penggunaan Dana Desa untuk 7 desa se-Kecamatan Ile Bura *meliputi Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas bidang (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan)* sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- ☞ Untuk kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 untuk 7 desa se-Kecamatan Ile Bura pengelolaan dana Alokasi Dana Desa sudah selesai dan masih menyisahkan beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dan akan dilanjutkan sampai dengan Minggu ke-IV Bulan Januari 2021. Kegiatan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 dan akan dianggarkan dalam APBDes 2021.
- ☞ Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak untuk 7 desa se-Kecamatan Ile Bura semuanya sudah direalisasi dan diperuntukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- ☞ Untuk progres penyerapan kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana sudah dilaporkan progres penyerapan keuangan dan beberapa kegiatan melalui penerapan Padat Karya Tunai.

4.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan

Pada hari Kamis, 01 Oktober 2020, titik api terlihat di kebun salah satu warga masyarakat Dusun Riangkaha, Desa Riangrita dan merambat dengan cepat sepanjang hutan di lereng gunung Lewotobi dikarenakan tiupan angin yang kencang. Tanggal 1 dan 2 Oktober 2020, Babinkamtibmas Ile Bura bersama anggota dan Kapospol Ile Bura bersama anggota, dibantu masyarakat Dusun Riangkaha, Desa Riangrita ± 20 orang berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya, namun medan dan angin kencang sehingga api belum bisa dipadamkan. Dan tanggal 2 Oktober Camat Ile Bura melakukan koordinasi baik dengan instansi terkait dan dengan para kepala desa se Kecamatan Ile Bura untuk bersama-sama mengatasi musibah kebakaran hutan agar api tidak meluas.

4.6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkhis, Sapatisme atau lainnya)
 - Sengketa lahan Masyarakat yang berlokasi di Boladatun (Desa Hewa-Kecamatan Wulanggitang) antara Matias Asan Liwu (Masyarakat Desa Hewa-Kecamatan Wulanggitang) degan Thomas Kuben Uran (Masyarakat Desa Lewotobi).
 - Gangguan Ketentraman dan Ketertiban lainya yag terjadi di desa-desa di Kecamatan Ile Bura, paling banyak berupa kasus perkelahian, kenakalan remaja, pencemaran nama baik dan asusila. Semua jenis gangguan ini dapat diselesaikan di tingkat desa, yang difasilitasi oleh pemerintah desa, pihak Pospol Ile Bura dan Babinkamtibmas Ile Bura.

BAB V
PENUTUP

Akhir kata semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kantor Camat Ile Bura ini dapat membantu pemerintah kabupaten nantinya dalam penyusunan laporan kepada Gubernur sesuai amanat Undang-Undang.

Sekian dan terima kasih.

Lewotobi, Februari 2021.

CAMAT ILE BURA,

